

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan tidak hanya mencerminkan kesulitan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan budaya. Ketidakmampuan individu untuk hidup sesuai dengan norma sosial yang bermartabat menunjukkan bahwa masalah ini lebih dari sekedar kurangnya pendapatan. Faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam memperburuk kondisi kemiskinan. Selain itu, isu kemiskinan juga berkaitan dengan ketidakseimbangan sosial yang kian melebar dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kemiskinan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia dan negara berkembang lainnya (Nailus Sakinah, 2023).

Kemiskinan memiliki dampak luas terhadap ketidakmampuan ekonomi dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan esensial, seperti pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana dasar. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Ponorogo masih menjadi tantangan yang signifikan, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Upaya

bersama dalam bentuk kebijakan yang tepat, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini demi terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah dan Proporsi Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2003-2023

Periode Maret 2022 hingga Maret 2023 menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo sebesar 1,91 ribu orang. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat 81,80 ribu orang, yang kemudian meningkat menjadi 83,71 ribu orang pada Maret 2023, atau naik sebesar 2,33 persen. Proporsi penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo menunjukkan peningkatan. Persentasenya naik dari 9,32 persen pada Maret 2022 menjadi 9,53 persen pada Maret 2023, atau bertambah sebesar 0,21 poin

persentase dalam setahun. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Ponorogo dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, karena kesejahteraan mencerminkan kualitas hidup penduduk dan kemajuan suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat dinilai berdasarkan sejumlah indikator, seperti besaran pendapatan, keterjangkauan pendidikan dan layanan kesehatan, kualitas hunian, serta peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, hal ini akan berkontribusi pada naiknya produktivitas dan daya saing suatu wilayah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat, baik melalui penguatan sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas.

Garis Kemiskinan merupakan batas minimum kebutuhan ekonomi yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau suatu rumah tangga tergolong miskin. Batas ini mencakup biaya yang diperlukan untuk memenuhi keperluan mendasar, seperti asupan nutrisi yang cukup, sandang, tempat tinggal, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan. Apabila rata-rata pengeluaran per kapita seseorang dalam satu bulan berada di bawah ambang batas kemiskinan, maka individu tersebut dianggap tergolong dalam kelompok

miskin. Konsep ini digunakan oleh pemerintah dan lembaga statistik untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Statistik, dan Rasio Penduduk Miskin di
Kabupaten Ponorogo 2003-2023

Tahun	Statistik Miskin (ribu jiwa)	Rasio Penduduk Miskin
2003	154,40	17,76
2004	153,20	17,61
2005	150,10	17,60
2006	154,40	17,76
2007	153,20	17,61
2008	150,10	17,60
2009	127,50	14,63
2010	113,00	13,22
2011	105,90	12,29
2012	101,40	11,76
2013	103,00	11,92
2014	99,90	11,53
2015	103,22	11,91
2016	102,06	11,75
2017	99,03	11,39
2018	90,22	10,36
2019	83,97	9,64
2020	86,74	9,95
2021	89,94	10,26
2022	81,80	9,32
2023	83,71	9,53

Hingga Maret 2023, terdapat 83,71 ribu penduduk Kabupaten Ponorogo yang hidup dibawah garis kemiskinan atau mencakup 9,53% dari jumlah penduduk. Dibandingkan Maret 2022, angka tersebut menunjukkan penurunan

jumlah penduduk miskin yang sebelumnya dilaporkan sebanyak 81,80 ribu orang atau 9,32%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan inisiatif yang berfokus dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh skema yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, perbaikan perekonomian, atau intervensi sosial lainnya. Pada periode ini terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 8,99% dari Rp 362.461,00 menjadi Rp 395.069,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar Rp 32.608,00. Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran harga kebutuhan pokok akibat inflasi atau faktor ekonomi lainnya (Badan Pusat Statistik, 2023).

Banyaknya program peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat di Kabupaten Ponorogo cenderung bersifat jangka pendek, sehingga menyebabkan individu kembali ke keadaan semula setelah program selesai. Arsyad (2023) juga mencatat bahwa masyarakat menghadapi tantangan dalam meningkatkan perekonomian karena terbatasnya akses terhadap modal dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mempersulit upaya mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan inisiatif yang lebih berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat mengamankan modal dan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan bisnis mereka. Menurut Syamsuddin & Fuady (2020), penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pemberdayaan yang

berkelanjutan dan inklusif dapat mengatasi masalah terbatasnya akses modal dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Sasaran dari program EMAS adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta mendukung pertumbuhan usaha mikro yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini menawarkan bantuan keuangan, pelatihan, dan peluang untuk mengakses modal usaha. Dana zakat, infaq, dan shadaqah merupakan sumber daya penting yang membantu pembangunan ekonomi lokal. Program EMAS dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo (Siregar & Soemitra, 2024).

Program EMAS di Kabupaten Ponorogo merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi tantangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Penekanan utama program ini tidak hanya pada peningkatan pendapatan, namun juga pada pemberdayaan individu untuk mencapai kemandirian ekonomi dan berkontribusi sebagai muzaki. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), meskipun angka kemiskinan turun menjadi 9,32% pada Maret 2022 dari 10,26% pada Maret 2021, namun masih terdapat sekitar 81,80 ribu penduduk yang hidup di bawah batas kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini masih mendesak. Oleh karena itu, program EMAS bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemiskinan melalui strategi

pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Brand-Correa. (2022) menunjukkan pentingnya inisiatif yang tidak hanya menawarkan bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga berperan aktif pada kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Program EMAS diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, namun juga membawa perubahan positif di bidang sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan merupakan fokus utama teori kesejahteraan sosial, dan aspek-aspek tersebut saling berhubungan dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian Joni Kastriya, agar lembaga zakat dapat secara signifikan meningkatkan kehidupan masyarakat kurang mampu, maka mereka harus menciptakan skema pemberdayaan masyarakat yang dirancang sesuai dengan kebutuhan khusus komunitas lokal. Hal ini akan memastikan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah digunakan secara efektif. (Kastriya, 2015) menguraikan bagaimana organisasi pengumpulan zakat dapat secara efisien mengelola dana zakat yang diperoleh dari masyarakat dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Program sosial yang dirancang dengan baik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan. Ramadhan (2021) mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya terkait dengan kondisi ekonomi, namun juga harus memperhatikan kemajuan di bidang pendidikan dan kondisi fisik kelompok sosial.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pendekatan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam memenuhi tujuan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Keberhasilan program EMAS sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk secara efektif berhubungan dengan masyarakat dan mengawasi dana yang terkumpul. Jika pengelolaannya tidak efektif maka dana tersebut tidak akan maksimal dalam memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, tugas utama Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal. Keberhasilan lembaga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas program pemberdayaan yang telah dirancang (Yuswar, et.al, 2015).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pendekatan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus pada dampak program terhadap kesejahteraan ekonomi. Peneliti akan menganalisis data dan hasil program untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta area yang perlu diperbaiki. Fokus utama adalah pengukuran dampak terhadap pendapatan masyarakat, akses layanan kesehatan, dan kemandirian ekonomi (Ramadhan, 2021). Keberhasilan menurunkan jumlah kemiskinan sangat menentukan efektivitas pembangunan. Dengan demikian, pengurangan kemiskinan menjadi indikator utama dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam Pembangunan (Zaid & Aufa, 2022). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dampak suatu program

dalam mengurangi kemiskinan serta memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi yang lebih efisien untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, studi ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan implementasi program serupa di daerah lain, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih merata.

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengukur pengaruh pendekatan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. Para peneliti akan memeriksa data dan hasil dari program ini untuk menentukan strategi yang efektif dan menemukan area yang perlu ditingkatkan. Ramadhan (2021) menekankan pentingnya menilai dampaknya terhadap status keuangan individu, kemampuan memperoleh layanan kesehatan, dan kemandirian finansial. Efektivitas pembangunan sangat bergantung pada keberhasilan pengurangan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, indikator utama untuk mengidentifikasi sektor-sektor prioritas pembangunan adalah pengentasan kemiskinan (Zaid & Aufa, 2022). Hasil kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan perspektif tentang sumbangsih program terhadap menanggulangi kemiskinan, serta memberikan saran untuk pengembangan kebijakan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil

penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi program serupa di daerah lain, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan lebih luas.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai topik ini. Melihat fenomena di atas, dengan demikian, Program EMAS merupakan salah satu inisiatif Lembaga Manajemen Infaq (LMI) yang memanfaatkan program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, hal ini mempunyai arti penting, terutama di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berpotensi untuk mengeksplorasi bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi seperti memberikan bantuan keuangan, menawarkan pelatihan, dan meningkatkan akses terhadap modal usaha dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Peneliti ingin menganalisis strategi program terhadap kesejahteraan masyarakat dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang diimplementasikan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) untuk memperbaiki taraf hidup dan menyediakan peluang usaha bagi mustahik. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang diberikan, penulis tertarik untuk memilih judul **“Strategi Peningkatan Kesejahteraan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) Pada Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Ponorogo”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat diambil fokus penelitian berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) oleh Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam terlaksananya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) dalam peningkatan kesejahteraan pada Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana strategi peningkatan kesejahteraan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) pada Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) oleh Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui tantangan dan hambatan dalam terlaksananya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) dalam peningkatan kesejahteraan pada Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui strategi peningkatan kesejahteraan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) pada Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi semua pihak, baik penulis maupun pembaca. Manfaat tersebut tidak hanya memperkaya pengetahuan intelektual, tetapi juga memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami topik yang diteliti. Secara lebih rinci, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan ilmiah dan memberikan referensi akademis yang bermanfaat bagi pembaca tentang Strategi Peningkatan Kesejahteraan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Ponorogo.

2. Secara Praktis

- a. Kepada peneliti, agar mengetahui Strategi Peningkatan Kesejahteraan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) Pada Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Ponorogo.
- b. Dapat menjadi bahan evaluasi dan sumbang pemikiran bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong semangat belajar dan memperkaya pemahaman yang lebih mendalam.

- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui Strategi Peningkatan Kesejahteraan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) Pada Lembaga Manajemen Infaq Kabupaten Ponorogo.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Strategi menjadi penekanan utama studi ini dalam peningkatan kesejahteraan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (EMAS) yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Ponorogo. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis implementasi program EMAS yang mendukung KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penelitian ini akan mengkaji pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah, mekanisme distribusi, pengembangan kapasitas kelompok, pendampingan usaha, serta penguatan jaringan pemasaran, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kapasitas usaha, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini juga mencakup tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dalam mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) berperan penting dalam mendorong keberlangsungan perekonomian masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

F. Definisi Istilah

1. Strategi

Menurut J.L Thompson, strategi adalah rencana jangka panjang yang strategis dan efisien yang berfokus pada pencapaian sasaran tertentu dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Menurut Oliver (2006), strategi dalam arti luas melibatkan tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mengembangkan rencana guna mencapai tujuan. Strategi bersifat disengaja dan berupaya memberikan panduan yang jelas. Dengan strategi, setiap tindakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan terukur. Penerapan strategi tidak terbatas pada individu saja, namun juga relevan dalam konteks kelompok, organisasi, dan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

2. Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “sejahtera” merupakan akar kata dari kata “kesejahteraan” yang berarti selamat, tenteram, sejahtera, serta bebas dari gangguan dan kesulitan. (Poerwadarminto 1999). Kata makmur mempunyai arti yang sama dengan kata Sansekerta “catera” yang artinya payung. Menurut Purwana (2014), dalam konteks kesejahteraan, yang dimaksud dengan “catera” adalah orang yang berkecukupan dan menikmati kehidupan yang damai dan tenteram, bebas dari ketakutan, kemiskinan, kekhawatiran dan kebodohan.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hakiki masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi individu dan masyarakat secara berkelanjutan. Program ini didasarkan pada analisis kebutuhan (*needs analysis*) menyeluruh untuk mengidentifikasi kebutuhan kolektif yang mendasar, bukan sekadar daftar keinginan (*list of wants*) sementara yang mungkin dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Melalui pendekatan partisipatif, program melibatkan masyarakat di semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan akuntabilitas bersama atas keberhasilan program tersebut (Zamhariri, 2008).

4. Lembaga Manajemen Infaq

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah organisasi amal profesional yang didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan individu yang miskin atau terpinggirkan secara ekonomi. Organisasi ini terlibat aktif dalam menghimpun dan mengawasi dana sosial dari berbagai sumber. Sebagai organisasi nirlaba, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) menjalankan perannya dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima dapat memberikan dampak yang nyata bagi penerima manfaat.

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) mengelola dana yang bersifat fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak dan prioritas masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dhuafa, tetapi juga fokus pada pemberdayaan agar mereka dapat mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Tujuan utama Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah meningkatkan status hidup individu yang menghadapi kesulitan, dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan pemberdayaan sebagai landasan utama (Agung Heru, 2017).

